

---

## Workshop Inklusi Kesadaran Pajak Pada Guru SD/MI Di Kota Jambi

| Diterima: 2 Februari 2021 | Direview: 2 Februari 2021 | Disetujui: 3 Februari 2021 |

**\*Ika Dwimaya Roza, Yorina An'guna Bansa, Ade Irma Suryani**

Universitas Muhammadiyah Jambi, Jl.Kapten Patimura Simpang IV Sipin Kota Jambi

Email:

[yorinabansa@gmail.com](mailto:yorinabansa@gmail.com)

### ABSTRAK

Inklusi kesadaran pajak dalam pendidikan sangat diperlukan dengan dilatarbelakangi yang pertama, tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, yang kedua, potensi pajak masih banyak belum tergali, dan ketiga perlunya memberikan pengertian tentang sadar pajak kepada tenaga pendidik SD/MI melalui pemberian materi kesadaran pajak dalam proses pendidikan (kurikulum, pembelajaran, perbukuan dan kesiswaan.. Mitra merupakan guru-guru SD/MI di lingkungan kota Jambi yang perlu diberikan pengetahuan inklusi kesadaran pajak karena capaian pembelajaran pajak diawali sedari dini dimulai dari tingkat sekolah dasar. Kegiatan ini bertujuan mengintegrasikan nilai-nilai kesadaran pajak dalam sistem pendidikan nasional agar dapat diajarkan oleh para guru secara terstruktur, sistematis, dan berkesinambungan, melalui kurikulum, pembelajaran, perbukuan, dan kesiswaan, serta kegiatan ini pun bertujuan untuk membangun generasi penerus bangsa yang berkualitas dan berkarakter; menunjukkan nilai-nilai kesadaran pajak sebagai bagian dari bela negara dan cinta tanah air. Metode Pelaksanaan ini berlangsung selama 2 (dua) bulan di Kota Jambi, dengan para peserta adalah para guru SD/MI, mengambil tempat di SMAN 5 Jambi, dengan metode pelaksanaan kegiatan adalah ceramah dan diskusi serta praktek mengajar mata pelajaran dengan mengintegrasikan materi kesadaran pajak pada konsep pembelajaran terpadu. Hasil yang didapat dari diskusi dan tanya jawab ini berujung pada kesepakatan bahwa menanamkan kesadaran tentang pajak patut diberikan melalui kurikulum pendidikan wajib dan proyek belajar tentang sadar pajak oleh para siswa Sekolah Dasar. Dampak dari pengabdian ini para guru SD/MI menyadari pentingnya urgensi pajak bagi masa depan dan hidup berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara dan satu konsep dalam menanamkan kesadaran pajak pada siswa di sekolah asal mereka melalui pendidikan di sekolah dengan konsep pembelajaran yang menarik.

**Kata Kunci: Inklusi Kesadaran Pajak, Kesadaran Pajak, Sistem Pendidikan Nasional, Guru SD/MI**

### ABSTRACT

*The inclusion of tax awareness in education is very much needed with the background of the first, the low level of taxpayers, the second, the potential for many taxes has not been explored, and the third is the need to instill tax awareness in SD / MI teachers through the integration of tax awareness materials in the education process curriculum, learning, book keeping and student / student affairs). Partners are SD / MI teachers in the city of Jambi who need to be given knowledge of tax awareness inclusion because tax learning achievements start from an early age starting from the elementary school level. This activity aims to integrate the values of tax awareness in the national education system so that teachers can build it in a structured, systematic and sustainable manner, through curriculum, learning, book keeping, and student affairs, and this activity also aims to build quality and the quality of future generations of the nation. in character; shows the values of tax awareness as part of defending the country and loving the country. The implementation method lasts for 2 (two) months in Jambi City, with participants being SD / MI teachers, taking place at SMAN 5 Jambi, with the method of implementing activities is lectures and discussions and teaching practice of subjects by integrating tax awareness material into the learning concept integrated. The results obtained from this discussion and question and answer led to an agreement that instilling awareness about taxes should be provided through the*

---

*compulsory education curriculum and learning projects about tax by elementary school students. The impact of this dedication of SD / MI teachers realizes the importance of taxes for the survival of the nation, society and state and agrees to instill tax awareness in students in their home schools through education in schools with interesting learning concepts.*

**Keywords:** *Inclusion of Tax Awareness, Tax Awareness, National Education System, SD / MI Teachers*

## PENDAHULUAN

Kesadaran Pajak adalah upaya yang sering dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak bersama dengan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan selaku pihak yang mempunyai tugas dalam bidang pendidikan untuk menanamkan kesadaran pajak kepada peserta didik dan tenaga pendidik melalui integrasi materi kesadaran pajak dalam proses pendidikan (kurikulum, pembelajaran, perbukuan dan kesiswaan/kemahasiswaan). Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan ini bertujuan agar para guru SD/MI di Kota Jambi juga dapat menambah pengetahuan dan wawasan mereka terhadap kesadaran pajak yang kelak dapat dimasukkan dalam pembelajaran di sekolah. Perguruan tinggi dapat berperan dalam mendukung reformasi perpajakan di Indonesia melalui Pengabdian kepada Masyarakat (Meiladi, 2020).

Mitra kegiatan PKM ini adalah guru-guru SD/MI di lingkungan kota Jambi yang perlu diberikan pengetahuan inklusi kesadaran pajak karena capaian pembelajaran pajak diawali sedari dini dimulai dari tingkat sekolah dasar. Capaian pembelajaran SD kelas I-III adalah mengenal manfaat pajak di lingkungan sekitar, mengenal fasilitas umum di lingkungan sekitar yang dibiayai dari pajak, dan memelihara fasilitas umum di lingkungan sekitar. Dan capaian pembelajaran siswa SD dikelas IV-VI adalah memahami manfaat pajak di masyarakat, memahami fasilitas umum di masyarakat yang dibiayai dari pajak, memahami fasilitas umum di masyarakat, dan menyadari manfaat dari hidup yang bergotong royong melalui kebiasaan dan rajin meakukan pembayaran pajak.

Inklusi kesadaran pajak dalam pendidikan diperlukan dengan dilatarbelakangi yang pertama, tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah; menurut data internal DJP, dari 10 orang Indonesia yang bekerja, hanya satu terdaftar sebagai wajib pajak, dari 10 orang wajib pajak, hanya 5 menyampaikan SPT, dan dari 20 orang wajib pajak, hanya satu orang membayar pajak. Yang kedua, potensi pajak masih banyak belum tergali; menurut sumber

data NK & APBNP 2015, 11.500 triliun rupiah GDP 2015, 1400 triliun rupiah potensi pajak, 1.060 triliun rupiah penerimaan pajak, dan 340 triliun rupiah potensi pajak hilang. Menurut survey Bank Dunia pada 2015, perbaikan citra DJP sangat diperlukan dengan masih banyak masyarakat yang berpersepsi bahwa DJP adalah lembaga yang korup dan pegawai pajak suka mengorupsi uang pajak serta persepsi bahwa membayar pajak tidak ada manfaatnya. Sehingga, Tim PKM memberikan pelatihan mengajar mata pelajaran yang berintegrasi dengan materi pajak kepada guru Sekolah Dasar agar kesadaran dan pengetahuan tentang pajak dapat ditumbuhkan sejak dini.

## **METODE PELAKSANAAN**

Peserta workshop atau pelatihan ini adalah perwakilan guru SD/MI yang ada di kota Jambi sebanyak 44 orang. Kegiatan ini dilaksanakan di SMAN 5 Kota Jambi. Workshop ini dilaksanakan selama dua bulan sejak dari masa persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan pengabdian masyarakat ini. Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat ini adalah ceramah, diskusi, dan praktek mengajar.

Tahapan persiapan terdiri dari koordinasi dengan para peserta yaitu para guru SD di Kota Jambi dan fasilitator dari SMAN 5 Jambi terkait rencana kegiatan pengabdian yang akan dilaksanakan di lokasi tersebut. Koordinasi dengan masing-masing sekolah asal para guru tersebut terkait peserta yang akan di kirimkan pada kegiatan pengabdian dari Universitas Muhammadiyah Jambi.

Penyusunan program pengabdian dilaksanakan berdasarkan pada hasil pemikiran bahwa kesadaran akan pajak perlu ditanamkan dari pendidikan dasar dan mengedukasi sejak dini bangsa yang dimulai dari bangku Sekolah Dasar adalah hal yang penting dilakukan. Kemudian kami menyebarkan angket tentang seberapa luas pengetahuan para guru Sekolah Dasar ini tentang pajak, kemudian selanjutnya memberikan pelatihan yang berlangsung selama dua bulan.

Beberapa materi yang disampaikan dalam rangkaian kegiatan pengabdian ini meliputi:

1. Bagaimana Cara Kerja Pajak Dalam Kehidupan Sehari-hari?

Berisi materi ajar sebagai berikut: (1) Praktek Penagihan Pajak Harian, (2) Selisih antara pajak dan penghasilan lainnya, (3) Klasifikasi pajak berdasarkan tujuan pemungutannya, (4) Pentingnya pajak bagi negara, dan (5) Data pemungutan pajak nasional. Tujuan dari pemberian materi ini adalah mendekatkan para guru SD/MI dengan pajak melalui peningkatan pemahamannya terhadap praktik pemungutan pajak dalam kehidupan sehari-hari. Pemaparan materi akan diakhiri dengan ringkasan dan proyek belajar sadar pajak bagi para peserta.

## 2. Mengapa Anda membutuhkan pajak?

Menjelaskan tentang: (1) Konsep dan urgensi kebutuhan pajak, (2) Alasan untuk membayar pajak, (3) Sejarah, sosiologis, dan politik asal usul pajak adalah untuk mensejahterakan rakyat dan menciptakan pemerataan, (4) Diskusikan perlunya pajak. (5) Sifat dan urgensi kebutuhan pajak untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan.

## 3. Bagaimana perpajakan dalam perjalanan sejarah Indonesia?

Menjelaskan sebagai berikut: (1) Status pajak yang timbul selama setiap periode dalam setiap perjalanan sejarah bangsa Indonesia, (2) Pelaksanaan dan masalah perpajakan yang dibahas dari waktu ke waktu, (3) Dokumen dan informasi yang dihasilkan dari wawancara dengan ahli atau orang untuk menjawab pertanyaan perpajakan, (4) Pemaparan dalam kelas.

## 4. Apa fungsi fiskal dalam pembangunan?

Menjelaskan karakteristik fiskal dari proses pembangunan. Sifat-sifat dokumen tersebut antara lain: (1) Pengertian pajak dalam proses pembangunan, (2) Konsep pembangunan dan alasan pentingnya pajak bagi pembangunan, (3) Dasar kewajiban perpajakan, (4) Pentingnya Kesadaran Pajak.

## 5. Bagaimana Peran Perpajakan dalam Mewujudkan Pelajaran Pancasila?

Menjelaskan Pancasila sebagai ideologi nasional dan pedoman bagi para pemimpin nasional dan warga negara untuk mencapai kesejahteraan nasional. Inti dari dokumen tersebut adalah sebagai berikut: (1) Konsep perpajakan sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila, meliputi pelajaran pertama berupa syukur, pengampunan, kedermawanan, kerendahan hati, dan

kejujuran. Pelajaran kedua adalah nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan peradaban. Pelajaran ketiga adalah rasa memiliki dan cinta tanah air. Pelajaran keempat terletak pada dialog, diskusi dan komunikasi untuk mencapai sikap mufakat. Pelajaran kelima keadilan distributif, hukum dan komutatif, (2) Karena pajak berkaitan dengan nilai Pancasila, (3) Sumber pajak historis dan sosial politik sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila, (4) Diskusi yang menjelaskan mengapa pajak dikaitkan dengan nilai Pancasila, (5) Hakikat dan urgensi perpajakan sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila. Salah satu pendukung utama tercapainya kesejahteraan nasional adalah pajak.

“Untuk Apa Kami Bayar Pajak...” adalah pertanyaan yang sering menjadi pertanyaan favorit para peserta dengan melihat maraknya korupsi pengemplang pajak. Karena itu dalam pelatihan Inklusi Kesadaran Pajak ini juga melatih kesadaran terhadap kewajiban sebagai warga negara yang baik bagi para pendidik untuk kemudian disampaikan pada generasi penerus bangsa dibangku sekolah.

Kegiatan ini juga dilakukan dengan diskusi kelas. Kegiatan dengan saling bertukar informasi tentang masalah yang ditemukan dalam masyarakat. Untuk melakukan kegiatan ini, seluruh anggota kelas diminta untuk berpartisipasi seperti: (1) Mencari dan membahas masalah-masalah sosial yang ada di bidang perpajakan. (2) Buat kelompok yang terdiri dari 2 atau 3 orang. Setiap kelompok membahas masalah yang berbeda dari kelompok lainnya. Kemudian setiap kelompok harus mempresentasikan dan menjawab pertanyaan yang diberikan berupa identifikasi dan analisis masalah. (3) Diskusikan tanggapan setiap kelompok dengan semua anggota kelas. (4) hasil-hasil jawaban tersebut kemudian akan dipaparkan dan untuk dapat digunakan dalam pengembangan dalam materi pembelajaran dikelas para peserta.

Tim PKM pun membuat grup online Whats App sebagai sarana monitoring online sebagai media untuk diskusi atau memberi pertanyaan seputar tugas pelatihan diluar kelas. Grup whatshaap ini pun diharapkan dapat sebagai media komunikasi agar tetap terjalin pasca pelatihan. Adapun jadwal pelaksanaan pelatihan sebagai berikut.

No	Nama Kegiatan	Bulan	
		1	2
1	Observasi Kondisi Terkini Mitra	✓	

2	Persiapan Pelatihan Edukasi Pajak dalam Pendidikan	✓	
3	Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan		✓

### HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK

Kegiatan Inklusi Kesadaran Pajak Bagi Guru SD/MI ini dibuka dengan sambutan dan pengenalan para pemateri yaitu para dosen Universitas Muhammadiyah Jambi yang terlibat sebagai pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) dengan para peserta yang berasal dari lingkungan pendidikan SD/MI di Kota Jambi. Kemudian dimulai dengan pemberian materi terkait tentang pajak oleh pemateri.



---

**Foto 1. Kegiatan memberikan paparan materi tentang Kesadaran Pajak bagi Guru-Guru SD/MI di Kota Jambi**

Kegiatan ini dilakukan dengan ceramah yaitu memberikan pemaparan materi tentang kesadaran pajak dan pengetahuan dasar tentang pajak yang diatur oleh pemerintah kepada para wajib pajak. Para guru-guru SD/MI yang mengikuti pelatihan ini sebagian adalah guru honorer, selain guru PNS yang ada di Kota Jambi. Materi tentang Pajak yang juga masuk dalam kurikulum pembelajaran dari tingkat SD sampai Perguruan Tinggi merupakan salah satu alasan kami memberikan pelatihan ini pada tenaga didik mulai dari tingkat Pendidikan Wajib di SD/MI di Kota Jambi, tujuan tahap ini adalah memberikan informasi tentang hal berkaitan tentang pajak yang diketahui oleh para Guru-guru SD/MI dan orang-orang di sekitarnya berkaitan dengan permasalahan kesadaran pajak. Pada materi ini akan menjelaskan pajak dalam kehidupan sehari-hari yaitu terdiri atas praktik pemungutan pajak, perbedaan pajak dengan pungutan lain, penggolongan pajak, pentingnya pajak, dan data penerimaan pajak secara nasional. Tujuan dari pemberian materi ini adalah mendekatkan para para guru SD/MI dengan pajak melalui peningkatan pemahamannya terhadap praktik pemungutan pajak dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan pertama yang dilontarkan adalah: Apakah Anda mengenal pajak? Pada pemaparan materi ini, akan dijelaskan lebih lanjut mengenai pajak dan bagaimana proses pembayarannya. Hal ini penting dijelaskan karena sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari pajak sudah menjadi suatu hal yang ternyata harus dibayar, misalnya pada saat melakukan transaksi jual beli barang kepada pihak ketiga. Contoh lainnya yaitu suatu ketika Anda makan di restoran siap saji dan tanpa disadari pada saat melakukan pembayaran Anda pun membayar pajak sesuai dengan tarif yang sudah ditentukan dengan tambahan pajak didalamnya, dan pajak itu disebut pajak restoran.

Kemudian akan dijelaskan juga mengenai istilah retribusi, cukai, bea meterai, dan sumbangan. Semua itu adalah beberapa jenis pungutan lain yang walaupun sama-sama dipungut oleh negara tetapi memiliki karakteristik yang berbeda. Pengertian pajak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, yaitu "pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat".<sup>1</sup> Dari contoh ini dapat kita lihat, betapa pentingnya pajak bagi negara untuk digunakan dalam membiayai pembangunan nasional.

Sedangkan jenis-jenis pungutan resmi lainnya, yaitu retribusi, cukai, bea masuk, dan sumbangan adalah : 1. Retribusi, contohnya penarikan retribusi dari setiap kendaraan yang lewat jalan tertentu. Jadi, dalam pemungutan retribusi tidak terdapat unsur paksaan dan ada ikatan pembayaran sejumlah uang tertentu. 2. Cukai, contohnya barang impor tidak boleh dikeluarkan dari pelabuhan sebelum cukainya dibayar. Sebagian dari hasil tanah (seperti sawah, ladang) yang wajib diberikan kepada tuan (pemilik) tanah sebagai ongkos tanah. 3. Bea masuk, adalah pajak yang dikenakan terhadap barang-barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean Indonesia dengan maksud untuk dikonsumsi di dalam negeri. Sementara itu, bea keluar adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang yang akan dikeluarkan dari wilayah pabean Indonesia dengan maksud barang tersebut akan diekspor ke luar negeri. 4. Sumbangan adalah iuran orang-orang atau golongan orang tertentu yang harus diberikan kepada negara untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran negara yang sifatnya tidak memberikan prestasi kepada umum, dan pengeluarannya tidak dapat diambil dari kas negara.<sup>2</sup>

Ditinjau dari segi lembaga pemungutnya, pajak dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, yang terdiri atas: 1. Pajak Penghasilan (PPh); 2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM); 3. Bea Meterai; 4. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Pertambangan, dan Perhutanan (PBB Sektor P3) 5. Pajak Ekspor; 6. Bea Masuk; 7. Cukai.<sup>3</sup> Pembagian Pajak Daerah bisa dilihat sebagai berikut: Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis Pajak Daerah, antara lain: 1. Pajak Provinsi, terdiri atas: a. Pajak Kendaraan Bermotor; b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; d. Pajak Air Permukaan; dan e. Pajak Rokok. 2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas: a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan Jalan; f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; g. Pajak Parkir; h. Pajak Air Tanah; i. Pajak Sarang Burung Walet; j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Edukasi pajak.go.id

<sup>2</sup> Materi Terbuka Kesadaran Pajak. 2016.

<sup>3</sup> Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak Inklusi Kesadaran Pajak dalam Pendidikan. 2019.

<sup>4</sup> Opcit

Dengan adanya pemaparan materi pajak tersebut para peserta memperoleh informasi yang dapat digunakan untuk memilih satu tema dalam kerja kelompok untuk memecahkan suatu permasalahan yang biasa nampak dalam kehidupan sehari-hari kemudian di diskusikan dan ditanggapi oleh kelompok lainnya.



**Foto 2. Ketika memberikan paparan Materi Kesadaran Pajak kepada Guru-guru SD/MI di Kota Jambi dan memberikan materi untuk di diskusikan bersama di kelas.**

Pada Sesi Diskusi Kelompok, setiap kelompok berbagi informasi tentang masalah yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari dimasyarakat. Untuk melakukan kegiatan ini seluruh anggota kelas terbagi dalam beberapa sesi (1) menelusuri dan mendiskusikan masalah yang ada dalam masyarakat yang dapat dilihat dalam kaitannya dengan persoalan pajak; (2) membuat kelompok yang terdiri atas dua sampai tiga orang. Masing-masing kelompok akan mendiskusikan satu masalah yang berbeda dengan kelompok lain. Kemudian, masing-masing kelompok harus mempresentasikan dan menjawab pertanyaan - pertanyaan yang sebelumnya mereka ajukan sebagai bahan diskusi; (3) mendiskusikan jawaban dari masing-masing kelompok dengan seluruh anggota kelas. Sebagai contoh, akan diberikan suatu perhitungan

dengan memakai analogi dengan sebuah keluarga, misalnya: Jika dalam suatu keluarga ada tiga sumber pendapatan yang utama: Ayah yang bekerja dan berpenghasilan 3,5 juta rupiah per bulan, kemudian ibu yang berdagang yang berpenghasilan 1,5 juta per bulan, kemudian si anak tertua yang berjualan online yang berpenghasilan 500 ribu per bulan. Jika ayah berhenti bekerja atau dipecat, maka keluarga tersebut kehilangan sumber utama penghasilan.

Pada paparan di atas, telah digambarkan bahwa pendapatan negara dari sektor pajak bagi keuangan negara seperti pendapatan kepala keluarga bagi keuangan keluarga. Jika pendapatan kepala keluarga terganggu sehingga pendapatan tersebut menjadi sangat kecil, apalagi sampai nihil, misalnya akibat terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), maka keuangan keluarga akan bermasalah. Demikian pula halnya yang akan terjadi dengan keuangan negara, apabila pendapatan pajak yang merupakan kontribusi terbesar dalam pendapatan negara terganggu. Hal tersebut akan menyebabkan keuangan negara menjadi bermasalah. Hal ini pun berlaku bagi negara, jika penerimaan pajak tidak terkumpul karena para Wajib Pajak enggan membayar pajak. Maka melalui analogi ini kelas merespon dengan baik materi yang disampaikan.



**Foto 3. Suasana diskusi kelas, yang terdiri dari 2-3 orang perkelompok.**

Hasil Diskusi Kelompok dapat diuraikan sebagai berikut. Pertanyaannya sebenarnya sangat sederhana. Misalnya, pertanyaan, "Mengapa kita selalu harus membayar pajak?" Tetapi apakah Anda membayar pajak atau tidak, itu sangat penting dan dapat ada di benak semua orang Indonesia. Sayangnya, pertanyaan seperti itu sering tidak terjawab, berdampak negatif bagi mereka yang menganggap pajak tidak perlu. Indonesia menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai negara yang menganut *good governance*. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk menjelaskan secara transparan ke mana pajak dibayarkan dan untuk apa pajak tersebut digunakan. Kewenangan untuk memungut pajak di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak, yang bertanggung jawab untuk memungut pajak sesuai dengan undang-undang. Wajib pajak harus membayar pajak di kantor pos atau di bank yang ditunjuk oleh pemerintah. Oleh karena itu, wajib pajak membayar pajak langsung ke kas negara.

Anggaran belanja pemerintah pusat kemudian dibuat untuk belanja yang didistribusikan ke semua kementerian atau lembaga negara. Ini termasuk pembayaran bunga

dan pokok pinjaman luar negeri, serta subsidi bahan bakar minyak, listrik dan pangan, dan konstruksi. Dan perawatan tanaman. Juga, jika banyak struktur publik yang masih belum memadai karena sistem perencanaan yang tidak berhasil, prioritas program, pelaksanaan kegiatan, inovasi karena keterbatasan anggaran, program kerja menjadi mayoritas kegiatan sehari-hari, hanya dijalankan melawan dan tidak banyak berpengaruh. Akibatnya, kualitas kerja sangat rendah sehingga memberikan kesan bahwa wajib pajak tidak diuntungkan dari pajak yang mereka bayarkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, masyarakat tampaknya justru telah diuntungkan dengan adanya pajak yang tidak disadari. Hingga saat ini, pemerintah telah menyalurkan beras murah untuk masyarakat miskin (Raskin), di antaranya subsidi bahan bakar minyak (BBM), subsidi listrik, subsidi pupuk, dan bantuan langsung masyarakat (BLSM), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), pembangunan pekerjaan umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/stadion dan sumber pembiayaan lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Jadi jawaban atas pertanyaan apa yang harus membayar pajak juga milik kita. Namun, anehnya yang menikmati fasilitas ini bukanlah pembayar pajak yang taat. Kenyataannya, bukan orang miskin yang termasuk dalam kategori penerima bantuan ini, tetapi kelompok - kelompok yang melalaikan kewajibannya kepada negara. Warga negara dalam kehidupan negara dan negara bagian yang dapat membayar pajak untuk berkontribusi pada pembangunan tetapi tidak mau dan hanya ingin mengambil manfaat dari hasil pembangunan, disebut pedompleng atau free rider.



**Foto 4. Sesi berfoto setelah selesai acara**

Pada sesi penutupan acara Inklusi Kesadaran Pajak Bagi Para Guru SD/MI ini diakhiri dengan berfoto bersama para peserta dan pemateri. Kegiatan PKM ini sungguh menjadi momen tersendiri bagi para pemateri dikarenakan suatu hal yang berharga sekali dapat berkumpul bersama para pendidik dari lingkungan SD/MI di Kota Jambi yang merupakan jenjang pendidikan formal pertama bagi generasi bangsa. Diharapkan materi yang disampaikan dapat bermanfaat dan dapat menjadi acuan dalam memberikan materi mengenai pentingnya kesadaran pajak disekolah asal peserta bagi anak didik dibangku SD/MI di Kota Jambi. Mencetak generasi emas Indonesia yang sadar pajak tahun 2045 masih penuh perjuangan. Untuk itu, optimism harus dipupuk dan koordinasi harus terus dibentuk untuk generasi Indonesia sadar pajak kini da nanti (Hapsari, 2021).



**Foto 5. Sesi berfoto di lokasi setelah memberikan Pelatihan tentang Inklusi Kesadaran Pajak Untuk Guru SD/MI di Kota Jambi**

Pajak bagi sebagian pemikiran masyarakat dapat menjadi suatu hal yang memberatkan, demikian juga dengan para pendidik dari Sekolah Dasar yang menjadi peserta pelatihan ini. Dikarenakan beberapa faktor, pertama-tama kurangnya pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan pajak dan mengapa pajak dipungut, serta memunculkan berbagai pendapat yang beragam. Kedua, tuduhan beberapa pihak terkait tentang pemungutan pajak yang dapat digelapkan oleh oknum pajak. Hal ini menimbulkan gagasan bahwa Anda tidak ingin memenuhi kewajiban Anda sebagai wajib pajak. Ketiga, anggapan bahwa pajak akan menjadi beban sehingga menciptakan banyak metode dan alasan untuk menghindari bahkan tidak mau melakukan pembayaran pajak. Keempat, kita menyadari pentingnya pajak bagi masa depan hidup bangsa dan masyarakat pada umumnya. Semua hal ini memiliki efek yang berbeda dan memerlukan tindakan dan cara mengatasinya pun berbeda juga. Membangun budaya patuh akan pajak adalah tanggung jawab kita bersama khususnya pendidik di sekolah

yang turut membangun kebiasaan baik sadar dan taat pajak dimulai dari pendidikan dasar (Darussalam, 2018).

Efek utama yang terkait dengan tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan pajak dapat dikoreksi melalui tips dan edukasi kesadaran pajak yang menjelaskan manfaat pajak bagi kehidupan korporasi, bangsa, dan negara. Dan efek lainnya yaitu dugaan penggelapan pajak dapat diatasi dalam akuntabilitas sebagai bentuk akuntabilitas lembaga publik.

Adapun kegiatan yang dilakukan dalam pelatihan meliputi aktifitas sebagai berikut:

1. Para peserta pelatihan ditugaskan dalam kerja kelompok untuk mencari beberapa peraturan perundang-undangan yang berisikan konsep diperlukannya pajak.
2. Para peseserta pelatihan dalam kerja kelompok ditugaskan untuk mendiskusikan dalam kelompok peran pajak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Para peserta pelatihan ditugaskan menyampaikan hasil penelusuran dalam bentuk paparan kelompok.

Hasil yang didapat dari diskusi dan tanya jawab ini berujung pada kesepakatan bahwa menanamkan kesadaran tentang pajak diberikan melalui kurikulum pendidikan wajib dan proyek belajar tentang sadar pajak oleh para siswa Sekolah Dasar.

## **SIMPULAN**

Pajak sangat berguna bagi pembangunan bangsa. Pajak merupakan salah satu sumber utama pemasukkan uang/penerimaan ke dalam kas negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara. Selain itu, pajak juga merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu demi kesejahteraan masyarakat.

Kesadaran pajak (*tax consciousness*) dan kepedulian untuk membayar pajak rakyat Indonesia masih rendah, dan masih perlu ditingkatkan. Peningkatan kesadaran pajak dapat dilakukan melalui program pendidikan, agar rakyat Indonesia mengerti fungsi dan kegunaan pajak dalam masyarakat dan manfaat bagi diri pribadi, serta mengerti bagaimana cara memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Oleh karena pengabdian masyarakat yang diselenggarakan dengan mengambil peserta para guru Sekolah Dasar di Kota Jambi ini bertujuan agar pemahaman kesadaran pajak diberikan sejak dini dengan memasukkan materi tentang pajak pada subjek pembelajaran di sekolah yang akan termuat dalam sistem pembelajaran.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Atas terselenggaranya pengabdian masyarakat yang penulis laksanakan, penulis mengucapkan apresiasi sebesar-besarnya pada Kampus Universitas Muhammadiyah Jambi khususnya LPPM Universitas Muhammadiyah Jambi yang mendanai pengabdian masyarakat ini dan kepada SMU Negeri 5 Kota Jambi sebagai tempat workshop inklusi kesadaran pajak ini serta kepada seluruh peserta workshop ini dari guru SD/MI Kota Jambi yang telah mengikuti pelatihan ini dengan antusias dan baik sekali.

## DAFTAR PUSTAKA

- Darussalam. (2018). *Mengedepankan Peran Edukasi Pajak*. Diakses dari <https://edukasi.pajak.go.id/artikelpilihan/176-darussalam.html>
- Hapsari, I. (2021). *Sukseskan Inklusi Dengan Semangat Kolaborasi*. Diakses dari <https://edukasi.pajak.go.id/artikelpilihan/243-sempat-tertinggal-kanwil-djp-jawa-tengah-i-sukseskan-inklusi-dengan-semangat-kolaborasi.html>
- Meiladi, R. (2020). *Perguruan Tinggi Sebagai Mitra Pemerintah Mendukung Reformasi Perpajakan*. Diakses dari <https://edukasi.pajak.go.id/artikelpilihan/241-perguruan-tinggi-sebagai-mitra-pemerintah-mendukung-reformasi-perpajakan.html>
- Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak. (2016). *Materi Terbuka Kesadaran Pajak Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI
- Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak. (2019). *Inklusi Kesadaran Pajak Dalam Pendidikan*. Jakarta: DJP Kementerian Keuangan RI